

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, R., dan Linn, J. 1994. "Fiscal Decentralization and Intergovernmental Transfers in Less Developed Countries". *The Journal of Federalism*, Vol. 24, No. 1 (winter, 1994), pp. 1 – 19 Published by: Oxford University Press. This content downloaded from 175.111.89.25 on Tue, 30 Dec 2014 23:53:22 PM.
- Basri, H., Junaidi, dan Syaparuddin. 2013. "Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi" (versi elektronik). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1, No. 2, Oktober.
- Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Total Media. Yogyakarta.
- Fadli, F. 2014. "Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006 – 2012)". *Journal of Economics and Sustainable Development* www.iiste.org ISSN 2222 – 1700 (Paper) ISSN 2222 – 2855 (Online) Vol.5, No.18. diakses 4 Januari 2015 10:42 AM.
- Fattah, S., dan Irman. 2012. "Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Era Otonomi Daerah Periode 2001 – 2008" (versi elektronik). *Journal Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum*. Volume 1. Nomor 2. Sulawesi Selatan.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., dan Mujib, I. 2009. *Problem dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Ladjin, N. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah". *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Mianti, R. 2014. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Ritonga, I.T. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Bahan Ajar Materi Kuliah Analisis Laporan Keuangan.
- Ritonga, I.T., Colin, C., dan Guneratne, W. 2012. “Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration”. *Public and Municipal Finance*, Vol. 1, Issue 2, pp. 37 – 50.
- Setiaji, W., dan Adi, P.H. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Setelah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa – Bali*. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanudin 26 – 28 Juli “versi online”. Diakses 31 Desember 2014 11:42 AM.
- Situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan - RI. www.djpk.go.id
- Szarowská, I. 2014. “Fiscal Decentralisation and Economic Development in Selected Unitary European Countries”. *European Financial and Accounting Journal*, Vol. 9, No. 1, pp. 22 – 40. Diakses 4 Januari 2015 10:42 AM.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Jakarta.
- Wikipedia. 2015. Profil Pulau Sulawesi. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas “versi online”. Tersedia di <http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Sulawesi>. Diakses pada 9 Januari 2015 02:13 AM.
- Zulkarnain. 2014. “Analisis Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak.